

SKRIPSI

“PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR”



DISUSUN OLEH:

NUR INDAH APRIANI

E051 191 040

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

NUR INDAH APRIANI

E051 191 040

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Nurlinah, M.Si

NIP. 19630912 198702 2001

Rahmatullah, S.IP. M.Si.

NIP.19770513 200312 1002

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NUR INDAH APRIANI

E051 191 040


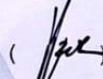

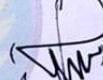

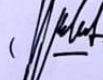
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Makassar, 21 Agustus 2023

Menyetujui

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. Nurlinah. M.Si	()
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP. M.Si.	()
Anggota	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	()
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si	()
Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Nurlinah. M.Si	()
Pembimbing Kedua	: Rahmatullah, S.IP. M.Si.	()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Indah Apriani

NIM : E051 191 040

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul:

“PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi saya ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Indah Apriani

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Shalom, Om Swastyastu, Namó Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MAKASSAR”**. Tak lupa pula peneliti kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ, yang Telah mengantar kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan saat ini.

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka besar harapan bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi kriteria.

Dalam kesempatan ini, peneliti akan menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini dikarenakan tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih yang

terkhusus untuk orang tua ibu Endang Kusmiati dan Bapak Rusli yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya sehingga mengantarkan saya untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Serta keluarga besar saya termasuk tante, om, keponakan, sepupu-sepu sayyang selalu memberi dukungan penuh, membantu saya dalam banyak hal dan memberi doa dan semangat dalam melakukan pendidikan. Selanjutnya, kepada Ibunda Prof. Dr. Nurlinah. M.Si. selaku pembimbing I yang senantiasa memberi arahan, bimbingan, saran dan semangat ketika saya sedang terpuruk menjalani proses perkuliahan sejak menjadi mahasiswa baru hingga hari ini dan Bapak Rahmatullah, S.IP. M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta bantuan dari awal penyusunan hingga pada penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam upaya Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Makassar dan referensi untuk Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini, peneliti juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya:
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya:

3. Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
4. Para tim penguji yaitu Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, (Alm) Prof Dr.A. Gau Kadir, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin, S.IP, M.Si, Yusriah Amaliah, S.IP., Afni Amiruddin, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin:
6. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.
7. Para informan dalam penulisan skripsi ini terkhususnya Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan manggala, Kelurahan Manggala. Kelurahan Tamangapa, Kelurahan Bangkala dan UPT TPA Tamangapa yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa

perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara.

8. Sobat-sobatku #BUKANPECUNDANG Zhahrillah Adriani Syam, Venike Sriyanti, Umi Kalsum, Aldiani Fitriayu Syam, Putri Dwi Septeffani, Tisa Ramadhani, Muthmainnah Putri Husaeni, Stevanny, Nurul Alfiani, Khaerunnisa, Putri Nabila Leri, Andi Rizka, Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik kehadiran kalian sangat bermakna bagi peneliti, berkat hal baik yang selalu diberikan sejak dulu sehingga peneliti mampu untuk menjalani proses perkuliahan dan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku “KOYO” Rizky, Pit, Radha, aunti sinta, putcam, uswatun, dan sabrina yang telah menjadi partner dan sahabat selama kurang lebih tujuh tahun menjadi saksi sekaligus tempat berbagi kisah hidup termasuk dalam hal perkuliahan Terima kasih atas energi baiknya peneliti sangat Bahagia bisa dekat dengan kalian.
10. Sahabat-sahabatku “freindship” Nurul Aulia, Safyra, Ida Nurfauziah, Aulia Amanda dan Aliyah Nafisah yang telah menjadi partner dan sekaligus keluarga selama kurang lebih sepuluh tahun menjadi saksi sekaligus tempat berbagi kisah hidup termasuk dalam hal perkuliahan Terima kasih atas energi baiknya peneliti sangat Bahagia bisa dekat dengan kalian.

11. untuk teman kostku dari maba sampai sekarang yang bertahan dan tidak pernah bosan dari satu kost dan memilih tinggal diramsis karena ingin hemat intinya terimakasih banyak telah sangat baik dan buat Bahagia peneliti dan senang dekat dengan Fitri Sahadatunita
12. Seluruh teman-teman “ZEITGEIST 2019” yang telah menjadi teman terdekat peneliti selama berada dikampus Andi Mushawwir (ketua Angkatan), Ilham, Zaky(Alm), adam indrawan, Wahyu, Viko, Ramlan, Aldian, Venike, Umi, Amirul, Andri, Lala, Nunu, Umi Rahayu, Fajri, Vira, Stevany, Inna, Arsel, Puput, Ibnu, Ila, Febrin, Okta, Pute, Resa, Tisa, Nisa, Eki, Indah P, Ulfi, Elisa, Lulu, Hafiqi, Rafly, Asrul, Fauziah, Ayu, Ae, Fitri, Era, Nailah.
13. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) utamanya untuk teman-teman Dewan Mahasiswa Pemerintahan Periode 2022-2023. sebagai wadah organisasi pertama dimasa perkuliahan yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, dan bersosial di kehidupan kampus dengan rasa kekeluargaan yang erat beridentitaskan Merdeka Militan.
14. Seluruh teman-teman angkatan 2019 S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
15. Kakak-kakak Kaizen 17 dan Eleftheria 18 terima kasih atas banyak bantuan dan support selama di perkuliahan. Juga adik-adik Maintiendrai 20, Dignite 21, Fuerza 22 Terima kasih telah

membersamai dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM).

16. Persepupuan di Posko 6 Kuliah Kerja Nyata Tematik 108 Kakao Bulukumba Miftahul Mitzar selaku kordes, Ardi, Agus Salim, Steeven Joseph Joshua Rungkat, Muhammad Kaisan Farasdag, Imam Alif Firadiansyah, Nur Azizah, Reski Dwi Putri, Nur Ersya Annisa Putri, Nur Amna, Andi Jumarni Syafruddin, Aulya Deswanda Pusvitasari. Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba terima kasih karena telah memberikan pengalaman yang mengesankan selama KKN dan turut memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi
17. Last but not least terima kasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang selama ini dalam melawan rasa takut, malas, kesepian, sedih, dan lelah dalam kondisi senang maupun terpuruk. Kiranya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang senantiasa melindungi, menyayangi, dan menguatkan.

Makasssar, 10 Juli 2023

Nur Indah Apriani

E051191040

DAFTAR ISI

SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	11
DAFTAR TABEL.....	13
DAFTAR GAMBAR.....	14
DAFTAR LAMPIRAN.....	15
ABSTRAK	16
BAB I PENDAHULUAN	18
1.1 Latar Belakang.....	18
1.2 Rumusan Masalah.....	28
1.3 Tujuan Penelitian	28
1.4 Manfaat Penelitian	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
2.1 Pelayanan.....	30
2.2 Pengelolaan Sampah	32
2.3 Kebijakan Perundangan	33
2.4 Kerangka Konseptual	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Tipe Dasar Penelitian	42

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.3 Informan Penelitian	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44
3.6 Fokus Penelitian	45
3.7 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Sampah .	47
3.8 Analisis Data	48
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	50
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
4.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup.....	59
4.3 Gambaran Umum Kecematan Manggala.....	64
4.4 Gambaran Umum Kelurahan Manggala.....	65
4.5 Gambaran Umum Kelurahan Tamangapa	66
4.6 Gambaran Umum Kelurahan Bangkala	68
4.7 Gambaran Umum TPA Tamangapa.....	69
4.8 Hasil Penelitian	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	109
5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas wilayah Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2020	58
Tabel 2. Sarana dan Prasarana (Alat Angkut)	86
Tabel 3. Data Rekapitulasi Produk Sampah dan Sampah Yang Tertangani Kecamatan Manggala Tahun 2019	90
Tabel 4. Data Rekapitulasi Produk Sampah dan Sampah Yang Tertangani Kecamatan Manggala Tahun 2020	91
Tabel 5. Data Timbulan Sampah Tahun 2020 UPT TPA Tamangapa.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep	41
Gambar 2. Peta Administrasi Pemerintah Kota Makassar	51
Gambar 3. Peta Wilayah Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar	66
Gambar 4. Peta Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar	69
Gambar 5. Peta Situasi TPA Tamangapa	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara.....	116
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	120
Lampiran 3. Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Pengelolaan Sampah	121

ABSTRAK

NUR INDAH APRIANI, Nomor Induk Mahasiswa E051191040, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul “**Pelayanan pengelolaan sampah dikota makassar**”, di bawah bimbingan Prof. Dr. Nurlinah. M.Si. selaku pembimbing utama dan Bapak Rahmatullah, S.IP. M.Si. selaku pembimbing pendamping.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan syatu proses yang panjang. Data dari hasil wawancara dan kepustakaan yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjasi sebuah hasil catatan lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Makassar sudah cukup baik, dimana pelaksanaannya didahului dengan memilah antara sampah organik dan sampah anorganik kemudian sampah yang masih bernilai dan dapat didaur ulang dan di bawa ke Bank Sampah, dan juga sebagian masyarakat berpartisipasi dalam memanfaatkan sampah dengan menjualnya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah antara lain factor pendukung (1) kebijakan pemerintah yang masih kurang memberikan pemahaman tentang regulasi yang ada mengenai pengelolaan sampah, (2) teknologi dan infrastruktur, hal ini meyangkut teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang masih lama, (3) keikutsertaan masyarakat dalam hal ini pengelolaan sampah baik dalam pemilahan, pengumpulan hingga pemrosesan akhir cukup baik, (4) kesadaran masyarakat, masih banyak yang belum sadar dengan lingkungan sekitar. (5) Sumber Daya Manusia, anggaran dan sumber daya finansial masih belum pasti, baik itu dana langsung dari dinas maupun dari wali kota sendiri.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pelakasanan Pengelolaan, Sampah

ABSTRACT

NUR INDAH APRIANI, Student Identification Number E051191040, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. The thesis entitled "**Waste management services in the city of Makassar**", under the guidance of Prof. Dr. Nurlinah. M.Sc. as the main supervisor and Mr. Rahmatullah, S.IP. M.Sc. as a co-advisor.

The purpose of this research is to find out the implementation of waste management policies in Makassar City and to find out the factors that influence waste management in Makassar City. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, literature studies, documentation. The data obtained is then analyzed simultaneously with the data collection process, the analysis process carried out is a long process. Data from interviews and literature obtained were then recorded and collected so that they became a result of field notes.

The results of this study indicate that the implementation of waste management in Makassar City is quite good, where the implementation is preceded by sorting organic waste and inorganic waste then waste that is still valuable and can be recycled and brought to the Garbage Bank, and also some people participate in utilizing waste selling it yourself. Factors that influence waste management include supporting factors (1) government policies that still lack understanding of existing regulations regarding waste management, (2) technology and infrastructure, this concerns that the technology used is old technology, (3) community participation in this case waste management both in sorting, collection to final processing is quite good, (4) public awareness, there are still many who are not aware of the surrounding environment. (5) Human Resources, budget and financial resources are still uncertain, whether the funds come directly from the agency or from the mayor himself.

Keywords: Policy Implementation, Management Implementation, Waste.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi atas beberapa daerah provinsi, kabupaten, dan kota dimana masing – masing diantaranya memiliki pemerintahan sendiri yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹ Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, melalui kebijakan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Indonesia memiliki penduduk 327 juta jiwa berbanding lurus dengan produksi sampah setiap harinya. Diperkirakan, tahun 2025

¹ Daerah Khusus and others, 'PUTUSAN Nomor 11/PUU-VI/2008', 2008, 1–99.

² Walikota Makassar, 'Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor: 4', 2011, 1–19.

produksi sampah di Indonesia akan mencapai angka 130.000 ton per hari. Ancaman itu bukannya alasan. Pasalnya aktivitas masyarakat pada umumnya menuntut untuk selalu berhubungan dengan makanan dalam kemasan.³

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan dengan tegas, pengertian sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu, sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat mudah membusuk atau terdegradasi oleh alam seperti sisa makanan, kertas atau koran, daun-daunan kering dan sebagainya. Sampah organik tergolong menjadi sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat terutama hasil dari daun dan makanan. Sampah organik dapat terdegradasi karena proses biokimia akibat mikro organisme yang mengurai materi organik sampah itu sendiri.⁴

Kota Makassar merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar ke sepuluh di Indonesia dengan jumlah sampah yang juga semakin meningkat. Volume sampah yang masuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah masih cukup besar, yaitu 20% dari total produksi sampah per hari Luas area Kota Makassar sebesar 175,77 km² dengan

³ Affiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 'Data Indonesia', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, september 2016, 2014, 1–16.

⁴ Jose helio duvaizem, 'Pencemaran Lingkungan Hidup Dan Perusakan Lingkungan', 2009, 12–42.

jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Total produksi sampah yang dihasilkan sebanyak 1.023 ton/hari (SIPSN, 2021). Dengan demikian, setiap orang menghasilkan sampah sebanyak 0,7 kg/hari. Persoalan pengelolaan sampah menjadi rumit, serumit dinamika sosial penduduknya. Akar persoalannya menjadi sistemik, di antaranya yaitu tingkat kesadaran dan perilaku warga, perhatian dari pemerintah, serta manajemen dan kebijakan pengelolaan sampah.⁵

Pengelolaan sampah bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam konteks tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolaan dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang berada di bidang yang sama dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan

⁵ Ratnawati Gatta and others, 'Transformasi Peran Dan Kapasitas Perempuan Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Makassar', *Jurnal Penyuluhan*, 18.02 (2022), 265–76
<<https://doi.org/10.25015/18202237888>>.

peran langsung yang berlandaskan payung hukum dalam bentuk undang-undang yang ada. Terkait dengan persampahan di Kota Makassar maka dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah Pemerintah Kota Makassar mempunyai peran penting dalam menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD. Dimana rencana pengurangan dan penanganan sampah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah pada perencanaan memuat target pengurangan sampah, target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA, pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat, kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kota dan masyarakat, rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, penanganan akhir sampah. Sedangkan pada pelaksanaan Pemerintah Kota Makassar dalam mengurangi sampah yaitu dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah dimana pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha, fasilitas pada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur

ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Pemerintah Kota Makassar dalam menangani sampah dilakukan dengan cara pertama pemilahan maksud dari pemilahan yaitu memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah dan dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya. Kedua pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Ketiga pengangkutan dilaksanakan dengan cara sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW, sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah kota Makassar, sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan /atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan, sedangkan sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah kota selanjutnya pelaksanaan pengangkutan sampah harus tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah dan alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Keempat pengolahan dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan. Kelima pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengembalian sampah dan /residu hasil pengolahan kedia lingkungan secara aman. Terlebih lagi Kurangnya sarana transportasi dan peralatan yang usang juga merupakan masalah dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah yang belum maksimal juga turut mempengaruhi jumlah timbulan sampah dan volume sampah yang masuk di TPA Tamangapa. Dimana prinsip pembuangan akhir adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir, jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Pertumbuhan volume sampah di Kota Makassar berdasarkan Berdasarkan data DLH Makassar, volume sampah di Makassar mencapai 7.374,5 ton per bulan dan 245,8 ton per hari. Potensi sampah Kota Makassar tahun 2021 adalah 410.291 ton atau dalam satu bulan mencapai 34.190 ton dan dalam satu hari mencapai 1.139 ton.⁶ Hal tersebut tidak bisa tertangani lagi dan Dinas petanaman dan kebersihan selaku penanggungjawab juga telah meminta adanya penambahan lahan sebesar 2 hektare di luar penambahan lahan

⁶ merdeka.com, 'Pemkot Makassar Siapkan Mesin Pengolah Sampah Berbasis Energi', *Merdeka.Com*, 2021 <<https://www.merdeka.com/peristiwa/pemkot-makassar-siapkan-mesin-pengolah-sampah-berbasis-energi.html>> [accessed 25 February 2023].

proyek PLTSa. jumlah ini cukup besar sehingga kondisi TPA sekarang sudah dalam status over kapasitas. Akibat permasalahan kerap muncul, utamanya di musim kemarau kebakaran tumpukan sampah di TPA Antang ini selalu menjadi momok yang tentunya mengganggu kesehatan warga sekitar. Produksi sampah di Makassar tentu tak bisa terelakan lantaran sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk kurang lebih mencapai 1,6 juta jiwa.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang telah kelebihan kapasitas. Pemerintah dinilai tak serius menangani persoalan sampah. Saat ini, tumpukan sampah di TPA Tamangapa, Antang sekitar 30 meter dan terlihat seperti gedung bertingkat. Volume sampah yang masuk di TPA sekitar 900 ton per hari. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar meminta adanya inovasi untuk mengurai kapasitas sampah di Makassar.

“Kita sudah rekomendasikan kalau program di 2021 ada pembebasan lahan. Agar over kapasitas setidaknya bisa diminimalisasi,” pungkasnya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar, Andi Iskandar mengungkapkan, pembebasan lahan di TPA Tamangapa memang diharapkan segera dilakukan. “Pembebasan lahan ini dimasukkan pada APBD 2021 nanti. Kemarin sempat terkendala karena ada refocusing dan diminta fokus pada pemulihan ekonomi,” pungkas Iskandar.

Bank Sampah yang awalnya dinilai mampu mengurai penumpukan

sampah di TPA Tamangapa, Antang, tersendat-tersendat sejak dipimpin Penjabat Wali Kota Makassar. Ketua Umum Asosiasi Bank Sampah Indonesia, Saharuddin Ridwan mengatakan terjadi pengurangan anggaran. Alhasil, partisipasi masyarakat dalam mengolah sampah organik dan sampah non organik mengalami penurunan. Padahal, 2 tahun sebelumnya 2018, anggaran yang disediakan 2 miliar dan mengalami penurunan ditahun 2019 sebanyak 900 juta. Kebijakan yang salah arah terhadap pengelolaan sampah dinilai akan semakin buruk bila tak berbasis padapelibatan masyarakat.

“Anggaran Bank Sampah tahun 2020 hanya 300 juta, dan 2021 tetap 300,” kata Sahar. Menurutnya, hal itu berimbas pada peredaran uang yang beredar di masyarakat yang juga ikut menurun. Bila sebelumnya geliat masyarakat untuk berpartisipasi terbilang tinggi, kini mengalami perubahan. Pelayanan armada penjemputan sampah pun mengalami perubahan. Saat ini penjemputan sampah masyarakat dari pihak kecamatan di bawah ke TPA Tamangapa. “Apa yang dirasakan masyarakat, bersih tapi itu pun maksimal, nilai sosialnya tidak ada, nilai ekonominya juga tidak ada,” ungkapnyanya. Kendati pernah menjadi percontohan nasional, anggaran Bank Sampah di Kota Makassar tak lagi menjadi program unggulan Pemerintah Kota Makassar.

Padahal, Bank Sampah dinilai membawa kontribusi positif bagi lingkungan, sosial, hingga ekonomi. Pemerintah Kota mengucurkan

dana di TPA Tamangapa sebanyak 8 miliar per tahun. “Uang habis hanya untuk sampah, tapi tidak ada partisipasi masyarakat,” tutupnya.⁷

Dengan tidak adanya Tindakan dari pemerintah Banyak masyarakat yang mengeluh tentang penumpukan sampah yang terjadi di TPA tamangapa Masyarakat, sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, Makassar, mengeluhkan adanya tumpukan sampah yang semakin membesar dan menyebarkan bau yang tak sedap. Para warga mengatakan bahwa kondisi tersebut sangat mengganggu kenyamanan dan kesehatan mereka.

Menurut salah seorang warga setempat, Fatimah, tumpukan sampah diTPA Tamangapa sudah mencapai ketinggian yang sangat tinggi dan terlihat dari jauh. "Bau busuk yang dihasilkan dari tumpukan sampah tersebut sangat mengganggu dan membuat kami tidak nyaman tinggal di sini," ujarnya.

Warga setempat juga mengatakan bahwa tumpukan sampah tersebut sangat berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, seperti penyakit kulit dan infeksi saluran pernapasan. Mereka meminta pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini.

⁷ kamsah, 'Makassar Darurat Sampah, "Gedung Bertingkat" Di TPA Antang', *Makassar.Terkini.Id*, 2021
<<https://makassar.terkini.id/makassar-darurat-sampah-gedung-bertingkat-di-tpa-antag/>>
[accessed 25 February 2023].

Menanggapi keluhan tersebut, pihak Dinas Lingkungan Hidup Makassar mengatakan bahwa mereka telah melakukan upaya untuk mengurangi tumpukan sampah di TPA Tamangapa. Namun, mereka mengakui bahwa volume sampah yang masuk terus meningkat dan membuat pengelolaan sampah menjadi semakin sulit.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Makassar juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan membuang sampah pada tempatnya. Mereka juga berencana untuk mengadakan program kampanye kebersihan dan pengelolaan sampah yang lebih efektif di masa mendatang.⁸

Sepanjang 300m dari 450m ruas jalan menuju lapangan pembuangan TPA Antang tak bisa diakses oleh model baru Tangkasaki (*compact dump*), dan hanya dapat diakses oleh truk pengangkut kontainer model lama (*arm roll truck*) dan motor sampah. Padahal dari 246 armada truk pengangkut sampah, sekitar kurang lebih 100 truk merupakan truk model lama (*arm roll truck*), sedangkan sisanya adalah truk model baru kapasitas 60 meter kubik.⁹

Oleh karena itu permasalahan sampah seharusnya lebih diperhatikan lagi sebabhal tersebut menyangkut kehidupan yang lebih

⁸ news.detik.com, 'Keluhan Warga Soal Tumpukan Sampah Di TPA Tamangapa Makassar', *News.Detik.Com*, 2022 <<https://news.detik.com/berita/d-5886624/keluhan-warga-soal-tumpukan-sampah-di-tpa-tamangapa-makassar>> [accessed 25 February 2023].

⁹ Andi Nurlaila Amalia Huduri, 'Yaitu Sampah Dikumpulkan, Diangkut, Dan Dibuang Ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Padahal, Timbunan Sampah Dengan Dengan Volume Yang Besar Di Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Berpotensi Melepas Gas Metan', 14 (2019), 197–207.

baik dengan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Sehingga, berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti ingin meneliti tentang **Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahpada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor Apa sajakah Yang Mempengaruhi Pengelolaan Sampah Di KotaMakassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam memaksimalkan

Implementasi Kebijakan pelayanan pengelolaan sampah.

- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis dalam mengembangkan konsep dan teori mengenai Pelayanan Pengelolaan sampah Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Metodologis

Secara metodologis penelitian ini diharapkan mampu lebih mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi penulis, nantinya hasil penelitian tersebut dapat menjadi acuan pemerintah kota Makassar dalam pengelolaan sampah.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan Pelayanan pengelolaan sampah.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah untuk dapat bersikap lebih aktif menjalankan perannya dalam pengelolaan sampah .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelayanan

2.1.1 Pengertian Pelayanan

Menurut Johanes Basuki (2013) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering.¹⁰

Dalam rumusan yang singkat ini, didalamnya terkandung nilai-nilai antarlain sikap ikhlas, kasih dan kepuasan dalam memberikan batuan kepada oranglain. Nilai ini menjadi sangat penting, mengingat yang dilayani adalah masyarakat (publik) yang harus diperlakukan secara istimewa. Mengapa dikatakan

¹⁰ Pelayanan Publik, 'Issn : 2337 - 5736', 1, 2018

demikian dikarenakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memiliki nilai atau harga yang tinggi, masyarakat juga akan menghargai kepada organisasi yang melayani lebih dari apa yang diterimanya. Hal ini juga sesuai dengan amanat undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa hakikatnya negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Membangun pelayanan publik yang dilakukan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

2.1.2 Konsep Pelayanan Publik

Konsep pelayanan publik merujuk pada upaya pemerintah dan lembaga publik untuk menyediakan layanan yang berkualitas, efisien, dan responsif kepada masyarakat. Pelayanan publik yang baik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kebijakan dan program publik.

2.2 Pengelolaan Sampah

2.2.1 Pengertian Pengelolaan Sampah

Menurut World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra 2007).¹¹

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹² Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi kegiatan; a. pemadatan; b. pengomposan; c. daur ulang materi; dan d. mengubah sampah menjadi sumber energi.

Sampah yang membusuk disebut juga sampah organik; seperti sisa daging, sisa sayuran, sisa buah-buahan, daun-daunan, sampah kebun dan lainnya. Adapun sampah yang tidak membusuk seperti plastic, kertas, botol, logam, karet, gelas, bahan bangunan bekas dan lainnya. Terdapat pula sampah berbahaya atau bahan beracun berbahaya (B3). Sampah ini diperoleh dari hasil industri atau rumah sakit yakni

¹¹ Goleman et al., 'Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Dengan Perilaku Ibu PKK Dalam Pengelolaan Sampah Di Dusun Mengwitani Kecamatan Mengwitani Kabupaten Badung', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

¹² George M. Savage, 'PERATURAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA', *Resources and Conservation*, 6.2 (1981), 163–64 <[https://doi.org/10.1016/0166-3097\(81\)90070-5](https://doi.org/10.1016/0166-3097(81)90070-5)>.

terdiri dari zat kimia organik dan anorganik dan logam berat lainnya. Oleh karena itu terdapat aturan tersendiri dalam pengelolaannya sehingga sampah jenis B3 ini tidak bisa dicampurkan dengan jenis sampah yang disebutkan sebelumnya.

2.3 Kebijakan Perundangan

Menurut Carl Friedrich, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Bentuk kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah yang tertuang dalam kebijakan perundangan yaitu Undang – undang

Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Kebijakan melalui Peraturan Pemerintah dan Daerah adalah :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah RumahTangga.
2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah menjadi landasan hukum bagi penulis dalam menyusun proposal ini.

Terdapat beberapa aturan yang telah di setujui oleh pemerintah mengenai pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, Lembaga pengelolaan dan insentif dan disinsentif.

Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan beberapa sarana prasarana pengelolaan sampah yang ada di Kota Makassar, antara lain:

1. Tempat Penampungan Sampah (TPS)

TPS merupakan sarana prasarana pengelolaan sampah yang berfungsi untuk menampung sementara sampah sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau tempat pemrosesan lainnya. TPS tersebar di seluruh wilayah Kota Makassar dan terdiri dari beberapa jenis, seperti TPS khusus

rumah tangga, TPS khusus pasar, dan TPS khusus industri.

2. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

TPA merupakan sarana prasarana pengelolaan sampah yang digunakan untuk memroses dan mengolah sampah secara lebih lanjut. Di Kota Makassar, TPA yang digunakan adalah TPA Tamangapa yang terletak di Kecamatan Tamalate. Sampah yang sudah diangkut dari TPS akan dibawa ke TPA untuk diproses.

3. Peralatan Pengangkut Sampah

Peralatan pengangkut sampah, seperti truk sampah, juga termasuk sarana prasarana pengelolaan sampah yang penting. Peralatan ini digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA atau tempat pemrosesan lainnya. Di Kota Makassar, terdapat berbagai jenis truk sampah yang digunakan, seperti trucksampah dengan sistem hidrolik dan truk sampah dengan sistem angkat kontainer.

4. Tempat Pengomposan Sampah

Selain TPA, Kota Makassar juga memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah lainnya yaitu tempat pengomposan sampah. Tempat ini digunakan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Tempat pengomposan sampah di Kota Makassar tersebar di beberapa wilayah seperti Biringkanaya, Tamalanrea,

dan Mamajang.

5. Bank Sampah

Bank sampah adalah sarana prasarana pengelolaan sampah yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang masih bisa didaur ulang, seperti kertas, plastik, dan logam. Sampah yang sudah terkumpul di bank sampah kemudian akan dijual ke pihak yang membutuhkan untuk didaur ulang. Di Kota Makassar, terdapat beberapa bank sampah yang tersebar di berbagai wilayah.

Prosedur pengaturan pengelolaan sampah rumah tangga yang melingkupi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan, melalui kegiatan:

- a. Penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah
- b. Memeriksa instalasi, timbulan sampah dan alat transportasi
- c. Meminta laporan dan keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

Adapun Alur Pembuangan Sampah Warga Kota Makassar sesuai dengan Prosedur pengangkutan/pengumpulan sampah bagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011:

1. Pengangkutan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 huruf C dilaksanakan dengan cara :

- a. Sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab Lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh RT/RW.
 - b. Sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintahan kota.
 - c. Sampah Kawasan pemukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri dan Kawasan khusus dais umber sampah ke TPS/TPST dan /atau TPA menjadi tanggung jawab pengelolaan pengawasan.
 - d. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintahan kota.
2. Pelaksana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
 3. Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, Kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Adapun alur pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan walikota Nomor 36 Tahun 2018. Berikut adalah alur pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Walikota Makassar tentang

Pengelolaan Sampah:

1. Pengumpulan Sampah

Petugas pengumpul sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Makassar mengumpulkan sampah dari rumah-rumah, gedung-gedung, dan tempat umum lainnya.

2. Transportasi Sampah

Sampah yang telah dikumpulkan oleh petugas pengumpul sampah diangkut menggunakan truk pengangkut sampah menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa.

3. Pemilahan Sampah di TPA

Sampah yang telah dibawa ke TPA Tamangapa akan dipilah untuk memisahkan sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik akan diolah menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik akan diolah lebih lanjut.

4. Pengolahan Sampah Non-Organik

Sampah non-organik seperti kertas, plastik, dan logam akan diolah menjadi bahan daur ulang atau dijadikan bahan bakar alternatif.

5. Pengolahan Sampah Medis

Sampah medis yang berasal dari rumah sakit dan

puskesmas akan diolah secara khusus untuk menghindari penyebaran penyakit.

6. Penyuluhan dan Edukasi

DLHK Makassar memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang cara membuang sampah yang baik dan benar. Masyarakat juga diberikan pemahaman tentang pentingnya pemilahan sampah untuk mendukung pengolahan sampah yang lebih baik.

7. Monitoring dan Evaluasi

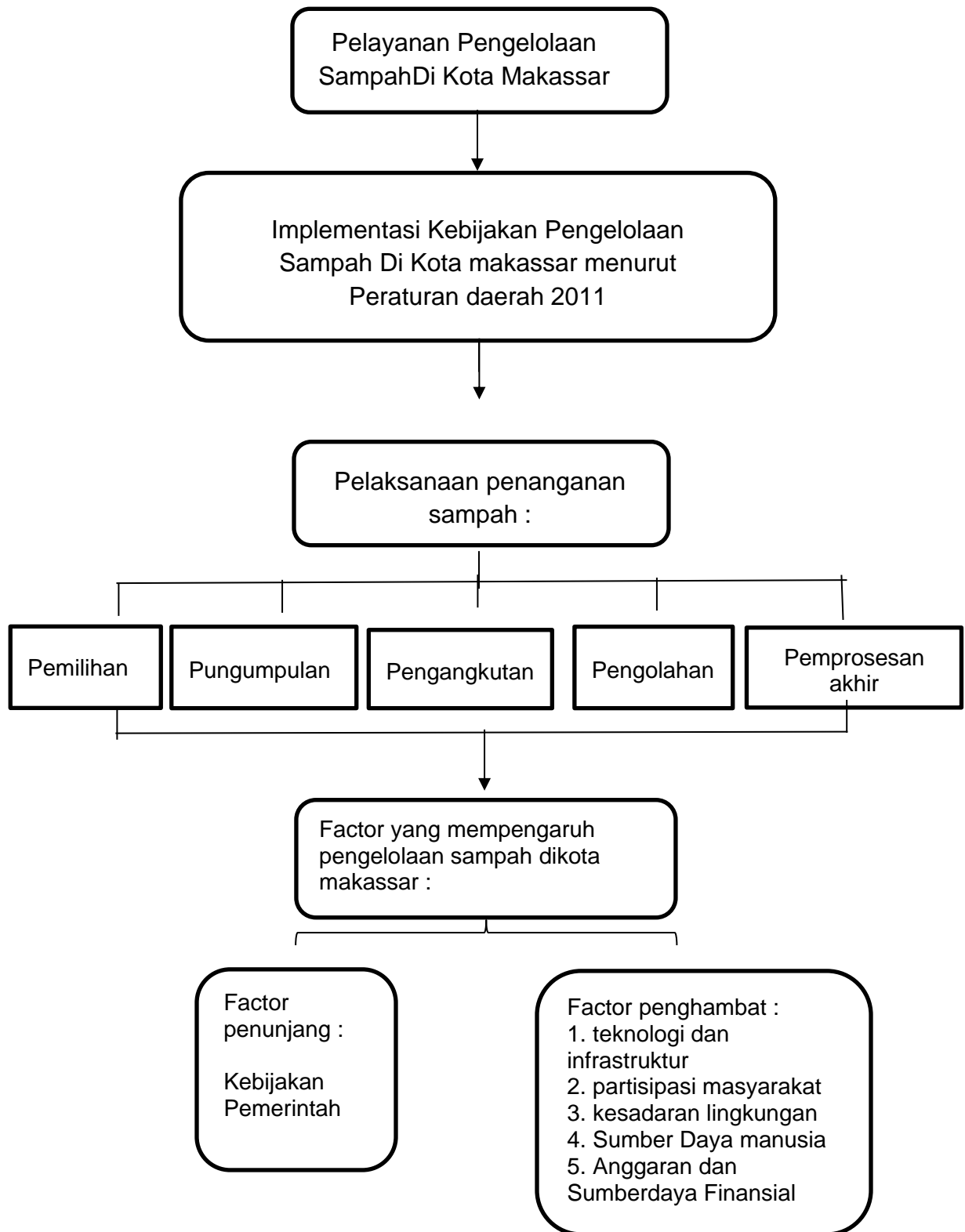
DLHK Makassar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan sampah secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan efektif.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun penjelasan kerangka konseptual penelitian ini, yaitu pedoman dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan sampah di kota makassar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun alur pelaksanaan pengelolaan sampah, yaitu: pemilahan, pengumpulan,

pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Dalam mengelola sampah dibutuhkan peran masing-masing lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi, dalam hal ini yakni: lembaga tingkat RT/RW, kelurahan, dan kecamatan. Tentu, pelaksanaan pengelolaan sampah ini sulit dilepaskan dari peran pemerintah kota dalam pemberian insentif maupun disinsentif.

Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah skema kerangka konsep sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konsep